

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara yang sekaaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan system penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional.¹ Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2002:1).

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggraan pemerintahan propinsi maupun kabupaten atau kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijakannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi.

Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja, akan tetapi juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerahnya. Pajak daerah merupakan

pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah.

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Jawa Barat. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kota Bandung berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satunya melalui pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Buku Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah adalah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna

mendukung pembangunan di daerah tersebut. Retribusi digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum;
2. Retribusi Jasa Usaha; dan
3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Di Kota Bandung pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial, karena pada tahun 2012 ini sektor pajak dan retribusi sudah mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD Kota Bandung sekitar 15%. Dari kenaikan tersebut, 1,2 triliun disumbangkan dari sector pajak, dan 150 miliar dari pendapatan retribusi (fokusjabar.com, 2012).

Seiring dengan pembangunan Kota Bandung yang semakin berkembang dan maju secara pesat, dan dengan berlakunya era perdagangan bebas, maka persaingan usaha di Kota Bandungpun semakin ketat dan tajam. Kondisi seperti ini menuntut perusahaan untuk selalu mengembangkan strategi perusahaan agar dapat terus berkembang mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi baik untuk memperkenalkan maupun memasarkan produknya.

Salah satu strategi yang dilakukan perusahaan dalam memperkenalkan dan memasarkan produknya sehingga penjualan (pendapatan) perusahaan meningkat serta dapat memperluas pangsa pasar perusahaan adalah melalui media periklanan (reklame). Dengan demikian penerimaan pajak reklame di Kota Bandung diproyeksikan akan selalu mengalami peningkatan dengan bertambah banyaknya perusahaan yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

pajak reklame dan retribusi daerah yang diharapkan dapat memberikan andil dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diuraikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandung secara simultan?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandung secara parsial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandung secara simultan.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Bandung secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame dan Retribusi Daerah.

2. Bagi Masyarakat

Digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan Pajak Reklame dan Retribusi Daerah.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan April-Juni guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dimana data akan diambil dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.